PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN, PENDAPATAN PERKAPITA, DAN KEMISKINAN TERHADAP RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI KALIMANTAN BARAT

TESIS

Disampaikan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Ekonomi Pada Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Tanjungpura

LUSIA BUDI SUSWANTI

NIM B2052231003

PROGRAM STUDI MAGISTER EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSTAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Nama	:	Lusia Budi Suswanti
NIM	:	B2052231003
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Magister Ilmu Ekonomi
Konsentrasi	:	Keuangan Daerah
Judul Tesis	:	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pendapatan Perkapita dan Kemiskinan Terhadap Rata-rata Lama Sekolah Di Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir). Apabila di dalamnya terbukti penulis melakukan plagiat, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tesis dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 7 Januari 2025



Lusia Budi Suswanti
NIM. 2052231003

PERTANGGUNGJAWABAN

Nama	:	Lusia Budi Suswanti
NIM	:	B2052231003
Konsentrasi	:	Keuangan Daerah
Judul Tesis	:	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pendapatan Perkapita dan Kemiskinan Terhadap Rata-rata Lama Sekolah Di Kalimantan Barat

Dengan ini menyatakan sebenarnya – benarnya bahwa seluruh isi tesis saya adalah murni hasil karya saya pribadi, tanpa menjiplak tulisan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata tulisan saya ini menjiplak tulisan karya orang lain, maka saya bersedia **digugurkan hak saya menyandang gelar Magister Ekonomi**.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipertanggungjawabkan.

Hormat Saya,



LUSIA BUDI SUSWANTI
NIM 2052231003

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul:

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pendapatan Perkapita dan Kemiskinan Terhadap Rata-rata Lama Sekolah Di Kalimantan Barat

Ini diajukan oleh:

Nama	:	Lusia Budi Suswanti
NIM	:	B2052231003
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi	:	Magister Ilmu Ekonomi
Konsentrasi	:	Keuangan Daerah
Tanggal Ujian	:	20 Januari 2025

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan dan lulus oleh Majelis Penguji dalam Ujian Tesis dan Komprehensif untuk memperoleh gelar Magister:

MAJELIS PENGUJI

Majelis Penguji	Nama	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
Pembimbing 1	Dr. Jumhur, SE., M.Si NIP. 19670928 199702 1 001	13/2/2025	
Pembimbing 2	Dr. Hj. Yarlina Yacoub, SE. M.Si NIP. 19621120 198903 2 003	13/2/2025	
Penguji 1	Dr. H. Bustami, SE, M.Si NIP. 19620612 1989 1 004	13/2/2025	
Penguji 2	Dr. Sri Kurniawati, SE, M.Sc NIP. 19760208 200501 2 002	13/2/2025	

Pontianak, Februari 2025

Mengetahui
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Ekonomi

Dr. Erni Panca Kurniasih, SE, M.Si
NIP. 197206071998032001

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulisan tesis yang berjudul: Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pendapatan Perkapita dan Kemiskinan Terhadap Rata-rata Lama Sekolah Di Kalimantan Barat ini dapat diselesaikan. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak. Selama penyusunan tesis ini penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, motivasi dan arahan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Barkah, S.E, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak
3. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB Universitas Tanjungpura Pontianak
4. Bapak Dr. Rosyadi, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi FEB Universitas Tanjungpura
5. Bapak Jumhur, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing ke satu yang telah banyak memberikan arahan, masukan, bimbingan serta meluangkan waktu bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Ibu Dr. Hj. Yarlina Yacoub, SE, M.Si Dosen pembimbing ke dua yang telah banyak memberikan arahan, masukan, bimbingan serta meluangkan waktu bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Bapak Dr. H. Bustami, SE, M.Si., selaku penguji ke satu yang banyak memberikan masukan untuk perbaikan tesis ini.
8. Ibu Dr. Sri Kurniawati, SE, M.Sc., selaku penguji ke dua yang juga telah banyak memberikan masukan dalam perbaikan hasil penelitian ini.

9. Dosen-dosen pengajar Magister Ilmu Ekonomi yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
10. Suami, anak-anak, orang tua dan keluarga tercinta yang yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.
11. Teman-teman angkatan XXXI yang juga selalu bersama-sama serta membantu dan memberikan banyak masukan dan dorongan kepada penulis agar bersama-sama menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan semoga tesis ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Pontianak, Januari 2025

LUSIA BUDI SUSWANTI
NIM. B2052231003

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pendapatan perkapita, dan kemiskinan terhadap Rata-rata Lama Sekolah di Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan data panel yang terdiri data *cross section* mencakup 14 kabupaten/kota dan data t*ime series* selama 10 tahun yaitu periode 2014–2023 di Kalimantan Barat, sehingga total berjumlah 140 data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.. Analisis dilakukan menggunakan metode regresi data panel dan menggunakan software EViews 10 sebagai alat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan pendapatan per kapita memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Rata-rata Lama Sekolah, sedangkan kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Rata-rata Kama Sekolah.

Kata Kunci: Rata-rata lama sekolah, pengeluaran pemerintah, pendapatan perkapita, kemiskinan

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of government expenditure in the education sector, per capita income, and poverty levels on the Average Years of Schooling in West Kalimantan. The research utilizes panel data consisting of cross-sectional data covering 14 regencies/cities and time-series data over a 10-year period from 2014 to 2023 in West Kalimantan, resulting in a total of 140 data points obtained from the Central Bureau of Statistics and the Regional Finance and Asset Agency. The analysis is conducted using the panel data regression method and employs EViews 10 software as the analytical tool. The results indicate that government expenditure in the education sector and per capita income have a positive and significant impact on the Average Years of Schooling, while poverty has a negative and significant impact on the Average Years of Schooling.

Keywords: Average years of schooling, government expenditure, per capita income, poverty

RINGKASAN

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan populasi yang besar dan beragam, menghadapi tantangan signifikan dalam menciptakan sistem pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh wilayahnya. Dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dan kondisi geografis yang bervariasi (BPS, 2022), akses pendidikan menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Ketimpangan pendidikan diperburuk oleh perbedaan sosial-ekonomi, budaya, dan infrastruktur, di mana daerah perkotaan cenderung memiliki fasilitas pendidikan yang lebih baik dibandingkan daerah pedesaan atau terpencil. Dalam konteks ini, pendidikan memegang peranan penting dalam pembangunan nasional karena menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan inovatif, yang mampu berkontribusi pada kemajuan ekonomi, pengurangan ketimpangan sosial, dan pelestarian budaya nasional.

Pendidikan tidak hanya memberikan keterampilan bagi individu untuk meningkatkan produktivitas tetapi juga berperan dalam memperkuat identitas nasional. Pendidikan berkualitas mendukung pengembangan sektor penting seperti teknologi, kesehatan, dan industri kreatif, yang menjadi pilar pembangunan berkelanjutan. Selain itu, pendidikan memungkinkan transfer nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda, memperkuat integritas nasional, dan menciptakan landasan yang kokoh bagi keberlanjutan pembangunan bangsa (Muhardi, 2014; Kardina & Magriasti, 2023).

Indikator penting untuk menilai kondisi pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yang mencerminkan rata-rata tahun pendidikan formal yang telah diselesaikan penduduk usia tertentu. Data menunjukkan bahwa meskipun RLS di Kalimantan Barat meningkat dari 6,93 tahun pada 2014 menjadi 7,71 tahun pada 2023, angka ini masih jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 8,77 tahun pada 2023. Kota Pontianak mencatat RLS tertinggi di provinsi ini, sementara beberapa kabupaten seperti Kayong Utara, Sambas, dan Melawi masih berada di bawah rata-rata provinsi. Kesenjangan ini mengindikasikan perlunya perhatian lebih terhadap daerah-daerah yang memiliki akses dan kualitas pendidikan terbatas.

Tantangan utama yang dihadapi Kalimantan Barat dalam peningkatan RLS meliputi keterbatasan infrastruktur pendidikan, kurangnya tenaga pengajar, dan kondisi ekonomi masyarakat yang rendah. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan di provinsi ini meningkat dari Rp 3.137 miliar pada 2014 menjadi Rp 5.223 miliar pada 2023. Namun, peningkatan anggaran ini belum mampu sepenuhnya mengatasi kesenjangan antardaerah. Kabupaten Sambas mencatat pengeluaran tertinggi pada 2023, yaitu Rp 592,35 miliar, sementara Kayong Utara hanya mencapai Rp 209,19 miliar. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran pendidikan perlu lebih merata untuk memastikan akses pendidikan yang setara di semua wilayah.

Penelitian ini menggunakan landasan teori yang mencakup modal manusia, pengeluaran pemerintah, pendapatan per kapita, dan kemiskinan sebagai faktor yang memengaruhi RLS. Teori Modal Manusia (Schultz, 1961; Becker, 1964) menekankan pendidikan sebagai investasi penting untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Teori Pengeluaran Pemerintah (Peacock dan Wiseman) menunjukkan bahwa pengeluaran untuk pendidikan cenderung meningkat selama krisis dan memiliki dampak jangka

panjang pada kualitas pendidikan. Teori Pendapatan Per Kapita (Frisch) mengaitkan pendapatan dengan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan yang lebih baik, sementara Teori Kemiskinan (Nurkse) menggambarkan bagaimana lingkaran setan kemiskinan membatasi akses pendidikan, memperkuat ketimpangan generasi.

Hasil kajian empiris menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan berpengaruh signifikan terhadap RLS, meskipun keberhasilannya sangat bergantung pada alokasi anggaran dan implementasi kebijakan. Pendapatan per kapita juga memiliki dampak positif yang signifikan terhadap akses pendidikan, tetapi pengaruhnya bervariasi tergantung pada kondisi ekonomi di setiap negara atau wilayah. Sebaliknya, kemiskinan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pendidikan. Lingkaran setan kemiskinan menghambat kemampuan keluarga untuk mendukung pendidikan anak-anak mereka, terutama dalam menyediakan kebutuhan tambahan seperti buku, seragam, dan transportasi.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Data panel yang digunakan mencakup 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat selama periode 2014-2023. Data ini merupakan gabungan antara data cross-section dan time series, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kalimantan Barat. Variabel dependen adalah RLS, sedangkan variabel independen mencakup pendapatan per kapita, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, dan kemiskinan. Definisi operasional variabel disesuaikan dengan sumber data resmi, dengan pengukuran menggunakan satuan tahun untuk RLS, rupiah untuk pendapatan per kapita dan pengeluaran pemerintah, serta persentase untuk tingkat kemiskinan.

Analisis data melibatkan serangkaian pengujian, termasuk uji akar unit untuk memastikan stasioneritas data, uji kointegrasi Pedroni untuk mengidentifikasi hubungan jangka panjang antarvariabel, serta uji model seperti Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier untuk menentukan model terbaik (common effect, fixed effect, atau random effect). Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t (parsial), uji F (simultan), dan uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengevaluasi pengaruh signifikan dan kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap RLS. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan alokasi anggaran pendidikan mampu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Pendapatan per kapita juga memberikan kontribusi positif signifikan, mencerminkan peran kesejahteraan ekonomi keluarga dalam mendukung keberlanjutan pendidikan anak-anak. Sebaliknya, kemiskinan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap RLS, menandakan bahwa hambatan ekonomi merupakan salah satu tantangan utama dalam upaya pemerataan pendidikan di Kalimantan Barat.

Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa meskipun telah terjadi peningkatan alokasi dana pendidikan dan jumlah tenaga pengajar di berbagai daerah, ketimpangan akses dan dampak kemiskinan tetap menjadi isu krusial. Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi, seperti Kayong Utara dan Melawi, memerlukan perhatian khusus untuk memastikan bahwa program-program pendidikan dapat menjangkau semua kelompok masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang terarah, peningkatan infrastruktur pendidikan, dan program

pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama pemerintah untuk mendukung pemerataan pendidikan.

Kesimpulannya, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara peningkatan anggaran pendidikan, penguatan ekonomi keluarga, dan pengentasan kemiskinan untuk mencapai pemerataan pendidikan di Kalimantan Barat. Strategi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan RLS, tetapi juga mendukung pertumbuhan SDM yang berkualitas, yang pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

SUMMARY

Indonesia, as a developing country with a large and diverse population, faces significant challenges in establishing an equitable and high-quality education system across its regions. With more than 17,000 islands and varying geographical conditions (BPS, 2022), ensuring access to education remains a major task for the government. Educational disparities are exacerbated by socio-economic, cultural, and infrastructural differences, where urban areas tend to have better educational facilities compared to rural or remote areas. In this context, education plays a crucial role in national development by producing competent and innovative human resources (HR) who can contribute to economic progress, social equality, and the preservation of national culture.

Education not only equips individuals with skills to improve productivity but also strengthens national identity. Quality education supports the development of key sectors such as technology, health, and creative industries, which are pillars of sustainable development. Additionally, education enables the transfer of national values to younger generations, fostering national integrity and creating a strong foundation for the continuation of the nation's development (Muhardi, 2014; Kardina & Magriasti, 2023).

An important indicator for assessing the state of education is the Average Length of Schooling (RLS), which reflects the average years of formal education completed by a certain population group. Data shows that although RLS in West Kalimantan increased from 6.93 years in 2014 to 7.71 years in 2023, this figure is still significantly below the national average of 8.77 years in 2023. Pontianak City recorded the highest RLS in the province, while several regencies such as Kayong Utara, Sambas, and Melawi remain below the provincial average. This gap highlights the need for greater attention to areas with limited access to quality education.

The main challenges faced by West Kalimantan in improving RLS include inadequate educational infrastructure, a shortage of teachers, and low economic conditions among communities. Government spending on education in the province increased from IDR 3,137 billion in 2014 to IDR 5,223 billion in 2023. However, this increase in funding has not been able to fully address interregional disparities. Sambas Regency recorded the highest education expenditure in 2023, amounting to IDR 592.35 billion, while Kayong Utara only reached IDR 209.19 billion. This disparity indicates that education budget allocation needs to be more evenly distributed to ensure equal access to education across all regions.

This study is grounded in theories encompassing human capital, government expenditure, per capita income, and poverty as factors influencing RLS. Human Capital Theory (Schultz, 1961; Becker, 1964) emphasizes education as a vital investment to enhance productivity and drive economic growth. Government Expenditure Theory (Peacock and Wiseman) explains that education spending tends to increase during crises and has long-term impacts on education quality. Per Capita Income Theory (Frisch) links income with the community's ability to access

better education, while Poverty Theory (Nurkse) describes how the poverty trap limits access to education, reinforcing generational disparities.

Empirical findings indicate that government spending on education has a significant positive impact on RLS, although its success heavily depends on budget allocation and policy implementation. Per capita income also positively influences access to education, but its effects vary depending on the economic conditions of each country or region. Conversely, poverty has a significant negative impact on education. The poverty trap hinders families' ability to support their children's education, particularly in meeting additional needs such as books, uniforms, and transportation.

This research employs a quantitative method with multiple linear regression analysis. The panel data used covers 14 regencies/cities in West Kalimantan over the 2014-2023 period. The data combines cross-sectional and time-series data sourced from the Central Statistics Agency (BPS) of West Kalimantan and the Regional Finance and Asset Agency (BKAD) of West Kalimantan. The dependent variable is RLS, while the independent variables include per capita income, government spending on education, and poverty. The operational definitions of variables align with official data sources, measured in years for RLS, rupiah for per capita income and government spending, and percentages for poverty rates.

The data analysis involved several tests, including unit root tests to ensure data stationarity, Pedroni cointegration tests to identify long-term relationships between variables, and model tests such as Chow, Hausman, and Lagrange Multiplier to determine the best model (common effect, fixed effect, or random effect). Hypothesis testing was conducted using t-tests (partial), F-tests (simultaneous), and the coefficient of determination (R^2) to evaluate significance and the model's ability to explain the dependent variable.

Chapter IV presents the research findings, which indicate that government spending on education has a significant positive impact on RLS. This demonstrates that increased education budget allocation can improve access to and quality of education. Per capita income also contributes positively, reflecting the role of household economic well-being in sustaining children's education. Conversely, poverty has a significant negative effect on RLS, highlighting economic barriers as a major challenge to achieving equitable education in West Kalimantan.

The study also identifies that despite increased education funding and the number of teachers in various regions, access disparities and the impact of poverty remain critical issues. Regencies with high poverty rates, such as Kayong Utara and Melawi, require special attention to ensure educational programs reach all societal groups. Therefore, targeted fiscal policies, improved educational infrastructure, and poverty alleviation programs should be top priorities for the government to support equitable education.

In conclusion, this study underscores the importance of synergy between increasing education budgets, strengthening household economies, and alleviating poverty to achieve equitable education in West Kalimantan. This strategy is expected not only to improve RLS but also to foster the growth of high-quality

human resources, ultimately contributing to sustainable economic and social development in the region.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT ii
PERTANGGUNGJAWABAN iii
PENGESAHAN iv
UCAPAN TERIMA KASIH v
ABSTRAK vii
RINGKASAN ix
SUMMARY xii
DAFTAR ISI xv
DAFTAR TABEL xvii
DAFTAR GAMBAR xvii
BAB I PENDAHHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 9
1.2.1 Pernyataan Masalah 9
1.2.2. Pertanyaan Penelitian 9
1.3. Tujuan Penelitian 9
1.4. Kontribusi Penelitian 10
1.4.1. Kontribusi Teoritis 10
1.4.2. Kontribusi Praktis 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11
2.1. Landasan Teori 11
2.1.1. Teori Modal Manusia 11
2.2 Kajian Empiris 12
2.3. Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian 15
2.3.1. Kerangka Konseptual 15
2.3.2. Hipotesis Penelitian 16
BAB III METODE PENELITIAN 17
3.1. Bentuk Penelitian 17
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 17
3.3. Sumber Data 17
3.4. Variabel Penelitian 17
3.5. Definisi Operasional variabel 17
3.6. Metode Analisis 18

3.6.1. Analisis Data Panel 18
3.6.2. Uji Data 19
3.6.2.1. Uji Akar Unit (Uji Stasioner) 19
3.6.2.2. Uji Kointegrasi 19
3.6.3. Uji Model 20
3.6.3.1. Uji Chow 20
3.6.3.2. Uji Hausman 20
3.6.3.3. Uji Lagrange Multiplier 20
3.6.4. Model Regresi Data Panel 20
3.6.5. Spesifikasi Model Regresi 21
3.6.6. Uji Hipotesis 22
3.6.1.1. Uji Parsial (Uji t) 22
3.6.1.2. Uji Simultan (Uji F) 22
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 23
4.1. Hasil Pengujian 23
4.1.1. Hasil Uji Data 23
4.1.1.1. Uji Akar Unit 23
4.1.1.2. Uji Kointegrasi 23
4.1.2. Hasil Uji Model 25
4.1.3. Hasil Uji Regresi Berganda 26
4.1.4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) 27
4.1.5. Hasil Uji Simultan (Uji F) 27
4.1.6. Hasil Uji Parsial (Uji t) 28
4.2. Pembahasan 28
4.3.1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap Rata-rata Lama Sekolah di Kalimantan Barat 29
4.3.2. Pengaruh Pendapatan Per Kapita terhadap Rata-rata Lama Sekolah di Kalimantan Barat 33
4.3.3. Pengaruh Kemiskinan Terhadap Rata-rata Lama Sekolah di Kalimantan Barat 37
BAB V PENUTUP 42
5.1. Kesimpulan 42
5.2. Saran 43
DAFTAR PUSTAKA 45

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rata-rata Lama Sekolah, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pendapatan Perkapita, dan Kemiskinan di Indonesia..... 3
Tabel 4. 1 Hasil Uji Akar Unit (Levin, Lin & Chu)..... 23
Tabel 4. 2 Hasil Uji Kointegrasi Pedroni..... 24
Tabel 4. 3 Hasil Uji Model Regresi..... 26
Tabel 4. 4. Hasil Uji Hipotesis (Random Effect Model)..... 26
Tabel 4. 5 Dana Bantuan Operasional Sekolah Berdasarkan Kab/Kota Prov Kalimantan Barat..... 29
Tabel 4. 6 Jumlah Guru Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, 2014 dan 2023..... 30
Tabel 4. 7 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kab/Kota di Kalimantan Barat Tahun 2014 dan 2023..... 35
Tabel 4. 8 Kemiskinan Menurut Kab/Kota di Kalimantan Barat 2014 & 2023 ... 38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Rata-rata Lama Sekolah di Indonesia dan Kalimantan Barat, 2014-2023.....2
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual 16

BAB I
PENDAHULUAN

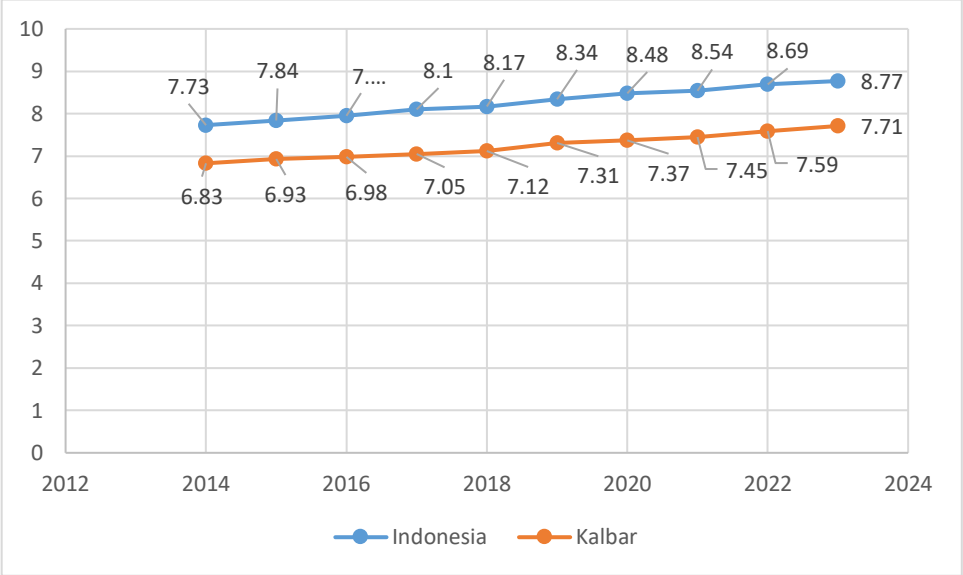
1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar dan beragam, menghadapi tantangan yang kompleks dalam menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya merata, tetapi juga berkualitas di seluruh wilayah. lebih dari 17.000 pulau (BPS, 2022) yang tersebar dan kondisi geografis yang beragam, pemetaan akses pendidikan menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar bagi pemerintah. Tantangan ini diperparah oleh perbedaan kondisi sosial-ekonomi, budaya dan infrastruktur antar wilayah, dimana daerah perkotaan cenderung memiliki fasilitas pendidikan yang lebih memadai dibandingkan dengan daerah pedesaan atau terpencil.

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Pendidikan yang berkualitas membentuk sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan inovatif, memungkinkan mereka untuk berkontribusi secara signifikan pada perekonomian dan kemajuan bangsa (Muhardi, 2014). SDM yang terdidik memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan masa depan dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, pendidikan merata dan inklusif mendorong kesetaraan sosial dengan memberikan semua warga negara hak akses yang setara terhadap pendidikan. Ini mengurangi ketidaksetaraan sosial dan membuka peluang bagi setiap individu untuk mencapai potensi maksimal (Fadil dkk, 2023).

Pendidikan yang baik mendorong inovasi dan melanjutkan pembangunan. SDM yang terdidik memiliki kemampuan untuk memajukan sektor-sektor penting seperti teknologi, kesehatan, dan industri kreatif, yang semuanya berperan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pendidikan juga memainkan peran penting dalam pemertahanan budaya dan identitas nasional. Melalui pendidikan, nilai-nilai kebangsaan dapat diperkuat dan warisan budaya dapat dipertahankan. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya membangun kemampuan individu tetapi juga memperkuat integritas dan identitas nasional, memastikan bahwa generasi mendatang memiliki pondasi yang kuat untuk melanjutkan pembangunan bangsa (Kardina & Magriasti, 2023).

Selain itu, tingginya angka populasi usia sekolah menuntut sistem pendidikan yang mampu mengakomodasi kebutuhan siswa dari berbagai latar belakang, baik dalam hal fasilitas, tenaga pengajar, maupun materi pembelajaran yang relevan. Salah satu indikator penting untuk menilai kondisi pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang mencerminkan rata-rata tahun pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh penduduk 15 tahun ke atas. RLS dapat digunakan untuk mengukur aksesiblitas dan keberlanjutan pendidikan di suatu wilayah, serta mencerminkan tingkat pencapaian pendidikan penduduk.



Gambar 1. 1 Rata-rata Lama Sekolah di Indonesia dan Kalimantan Barat, 2014-2023

Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan RLS di Indonesia dan Kalimantan Barat (Kalbar), secara umum terlihat bahwa adanya peningkatan tren RLS baik secara nasional maupun Kalbar yang mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan akses dan keberlanjutan pendidikan formal. RLS nasional pada tahun 2014 berada pada angka 7,84 tahun dan terus meningkat hingga mencapai 8,77 tahun pada tahun 2023. Sementara itu, RLS Kalimantan Barat pada tahun yang sama menunjukkan angka yang lebih rendah, yaitu 6,93 tahun pada 2014 dan meningkat menjadi 7,71 tahun pada 2023, yang menunjukkan bahwa secara rata-rata penduduk Kalbar pada tahun 2023 menempuh pendidikan formal hanya sampai kelas 7 (1 SMP).

Meski ada kemajuan di Kalimantan Barat, kesenjangan RLS antara wilayah ini dan rata-rata nasional tetap terlihat. Hal ini mencerminkan bahwa Kalimantan

Barat masih menghadapi tantangan dalam pemerataan pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil. Faktor-faktor seperti keterbatasan infrastruktur pendidikan, jumlah tenaga pendidik yang belum mencukupi, serta tingkat ekonomi masyarakat yang lebih rendah dibandingkan wilayah lain di Indonesia dapat menjadi penyebab kesenjangan ini.

Tabel 1. 1
Rata-rata Lama Sekolah, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pendapatan Perkapita, dan Kemiskinan di Indonesia

Kab/Kota	RLS (tahun)		Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (miliar)		Pendapatan Perkapita (juta)		Kemiskinan(%)	
	2014	2023	2014	2023	2014	2023	2014	2023
Sambas	5,80	6,75	303,14	592,35	25,27	40,43	9,46	7,08
Bengkayang	5,97	7,22	168,25	442,25	23,60	37,28	7,20	6,28
Landak	7,05	7,24	245,90	370,53	18,89	33,09	13,71	9,97
Mempawah	6,33	7,20	194,93	284,01	20,21	34,25	6,00	5,21
Sanggau	6,37	7,44	297,80	451,03	30,08	48,68	4,47	4,79
Ketapang	6,22	7,55	156,68	262,85	32,81	59,49	11,6	9,25
Sintang	6,63	7,64	294,03	516,20	22,85	42,43	9,11	8,18
Kapuas Hulu	6,65	7,82	225,61	399,90	26,39	50,08	10,03	8,16
Sekadau	6,54	7,13	112,50	209,19	24,49	40,46	6,31	5,90
Melawi	6,00	7,42	273,95	490,56	29,65	59,95	12,4	11,12
Kayong Utara	5,19	6,35	151,53	258,12	16,95	27,74	9,55	9,13
Kubu Raya	6,41	7,04	156,68	262,85	19,43	38,71	5,45	4,23
Pontianak	9,62	10,45	357,04	427,86	42,29	70,89	5,15	4,45
Singkawang	7,26	8,21	199,18	255,36	34,42	52,41	5,88	4,70
Kalimantan Barat	6,83	7,71	3137	5223	25,89	48,81	8,54	6,71
Rata-rata			224,09	373,08				

Sumber: BPS Kalimantan Barat, 2024.

Jika dilihat lebih dalam berdasarkan Tabel 1.1. Pada tahun 2014, terdapat beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Barat yang memiliki Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di bawah rata-rata provinsi, yaitu 6,83 tahun. Kabupaten-kabupaten tersebut meliputi Sambas (5,80 tahun), Bengkayang (5,97 tahun), Mempawah (6,33 tahun), Sanggau (6,37 tahun), Ketapang (6,22 tahun), Melawi (6,00 tahun), Kayong Utara (5,19 tahun), dan Kubu Raya (6,41 tahun). Meskipun terjadi peningkatan dalam kurun waktu sembilan tahun, pada tahun 2023 masih terdapat sepuluh

kabupaten/kota yang RLS-nya berada di bawah rata-rata provinsi, yaitu 7,71 tahun. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah Sambas (6,75 tahun), Bengkayang (7,22 tahun), Landak (7,24 tahun), Mempawah (7,20 tahun), Sanggau (7,44 tahun), Ketapang (7,55 tahun), Sekadau (7,13 tahun), Melawi (7,42 tahun), Kayong Utara (6,35 tahun), dan Kubu Raya (7,04 tahun). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan RLS di semua kabupaten/kota, masih terdapat kesenjangan dalam pencapaian pendidikan di beberapa wilayah dibandingkan dengan rata-rata provinsi. Hal ini menandakan perlunya perhatian lebih pada kabupaten/kota yang masih tertinggal dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.

Banyak faktor yang mempengaruhi RLS, menurut Becker dalam Muhardi (2014) diantaranya adalah pengeluaran pemerintah untuk bidang pendidikan, pendapatan perkapita dan tingkat kemiskinan keluarga. Berdasarkan data dari 2014 hingga 2023, terlihat adanya peningkatan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan di Kalimantan Barat, dari 3.137 miliar rupiah pada 2014 menjadi 5.223 miliar rupiah pada 2023. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperbaiki kualitas dan akses pendidikan, sejalan dengan amanat UUD 1945 yang menetapkan alokasi minimal 20% dari belanja negara untuk pendidikan. Dengan dana yang meningkat, berbagai upaya seperti pembangunan sekolah, peningkatan fasilitas, pelatihan guru, dan penyediaan beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu menjadi lebih memungkinkan. Hal ini diharapkan dapat berdampak positif pada peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yang naik dari 6,83 tahun pada 2014 menjadi 7,71 tahun pada 2023.

Namun, peningkatan pengeluaran pemerintah ini belum sepenuhnya mampu mengatasi kesenjangan RLS di Kalimantan Barat. Beberapa kabupaten/kota seperti Kayong Utara (6,35 tahun), Sambas (6,75 tahun), dan Kubu Raya (7,04 tahun) masih mencatatkan RLS di bawah rata-rata provinsi pada 2023. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan anggaran, pemerataan akses dan kualitas pendidikan belum sepenuhnya tercapai.

Berdasarkan Tabel 1.1. Mencerminkan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan di Kalbar dari 2014 dan 2023. Total pengeluaran Kalbar dalam bidang pendidikan adalah Rp 3.136.210.000.000 (2014) meningkat menjadi Rp

5.223.060.000.000 (2023). Peningkatan pengeluaran ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, meskipun ketimpangan antar kabupaten/kota masih menjadi tantangan. Kabupaten Sambas mencatatkan pengeluaran tertinggi pada 2023 dengan Rp. 592.000.000. Sebaliknya, Kabupaten Kayong Utara memiliki pengeluaran terendah yaitu Rp 209.190.000 menurun dari Rp 589.020.000 (2019).

Beberapa kabupaten juga menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam pengeluaran, seperti Kabupaten Kapuas Hulu yang naik dari Rp 225,61 juta di tahun 2014 menjadi Rp 399,90 juta di tahun 2023, dan Kabupaten Kubu Raya yang konsisten mengalami peningkatan dari Rp 273,95 juta pada tahun 2014 menjadi Rp 490,56 juta pada tahun 2023. Namun, ada beberapa kabupaten yang mengalami penurunan pengeluaran di tahun 2023, seperti Kabupaten Mempawah yang turun menjadi Rp 284,01 juta dari puncaknya di tahun 2019 sebesar Rp 619,13 juta, dan Kabupaten Ketapang yang mengalami penurunan dari Rp 395,09 juta di 2019 menjadi Rp 262,85 juta pada 2023.

Peningkatan Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan harusnya berkorelasi positif dengan peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Dengan alokasi dana yang lebih besar untuk sektor pendidikan, diharapkan kualitas dan akses terhadap layanan pendidikan akan meningkat, sehingga masyarakat dapat menghabiskan lebih banyak waktu di bangku sekolah. Hal ini penting sebagai indikator peningkatan kualitas sumber daya manusia di setiap wilayah. Dengan demikian, upaya pemerintah dalam meningkatkan anggaran untuk pendidikan di Kalimantan Barat menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan pendidikan masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan berbagai indikator sosial-ekonomi Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Kesenjangan ini menggambarkan masalah serius dalam hal pemerataan akses dan kualitas pendidikan di Kalbar. Daerah yang berada di bawah rata-rata provinsi cenderung memiliki tantangan yang lebih besar dalam memberikan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan kepada warganya. Akses ke sekolah yang mungkin sulit dijangkau, kualitas infrastruktur pendidikan yang kurang memadai, kekurangan guru, atau bahkan tantangan ekonomi yang memaksa anak-anak putus sekolah lebih awal, menjadi faktor-faktor yang berkontribusi pada rendahnya angka

rata-rata lama sekolah di kabupaten-kabupaten tersebut. Masalah ini menunjukkan bahwa sebagian besar daerah di Kalimantan Barat masih menghadapi tantangan dalam memastikan akses dan kualitas pendidikan yang merata. Faktor-faktor yang berkontribusi termasuk infrastruktur pendidikan yang terbatas, kekurangan tenaga pengajar yang berkualitas, dan tingkat kemiskinan yang tinggi di beberapa daerah. Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat menghambat akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga miskin, sementara infrastruktur pendidikan yang kurang memadai dan kekurangan tenaga pengajar dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang diterima.

Di sisi lain, pendapatan per kapita di Kalimantan Barat mengalami peningkatan yang signifikan, dari 25,89 juta rupiah menjadi 48,81 juta rupiah. Peningkatan ini mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan masyarakat untuk memiliki daya beli yang lebih tinggi, termasuk dalam hal pendidikan. Secara teori, kenaikan pendapatan per kapita ini seharusnya mampu mendorong keluarga untuk lebih berinvestasi dalam pendidikan anak-anak mereka, seperti membiayai keperluan sekolah, membeli perlengkapan pendidikan, dan mendukung kegiatan ekstrakurikuler yang dapat memperkaya pengalaman belajar (Maulidah & Soejoto, 2015). Investasi ini diharapkan berdampak pada peningkatan RLS yang secara keseluruhan meningkat dari 6,83 tahun pada 2014 menjadi 7,71 tahun pada 2023.

Namun, tidak semua kabupaten/kota di Kalimantan Barat mengalami peningkatan pendapatan per kapita yang merata. Beberapa kabupaten seperti Kayong Utara dan Melawi, misalnya, masing-masing mencatatkan pendapatan per kapita sebesar 27,74 juta rupiah pada 2023, yang jauh di bawah rata-rata provinsi. Rendahnya pendapatan di kabupaten-kabupaten ini menjadi tantangan serius, karena keluarga dengan keterbatasan ekonomi mungkin tidak memiliki cukup sumber daya untuk mendukung pendidikan anak-anak mereka. Anak-anak dari keluarga dengan pendapatan rendah cenderung menghadapi berbagai hambatan, seperti kebutuhan untuk membantu ekonomi keluarga, sulitnya menjangkau fasilitas pendidikan, hingga minimnya akses terhadap materi pembelajaran yang memadai.

Kondisi ini menjadi semakin kompleks di daerah-daerah terpencil, di mana infrastruktur pendidikan sering kali terbatas. Kurangnya sekolah berkualitas, keterbatasan tenaga pendidik, dan minimnya fasilitas transportasi membuat akses ke pendidikan menjadi tantangan tambahan, terutama bagi keluarga dengan pendapatan rendah. Akibatnya, meskipun pendapatan per kapita secara agregat meningkat, kesenjangan dalam akses pendidikan masih tetap ada, yang tercermin dalam RLS kabupaten seperti Kayong Utara (6,35 tahun) dan Sambas (6,75 tahun) yang masih di bawah rata-rata provinsi pada 2023.

Kemiskinan, yang secara umum menurun dari 8,54% pada 2014 menjadi 6,71% pada 2023, memainkan peran signifikan dalam memengaruhi akses dan kualitas pendidikan di Kalimantan Barat. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan sejumlah program pembangunan ekonomi dan intervensi pemerintah dalam mengurangi beban ekonomi masyarakat, baik melalui bantuan langsung maupun program pengembangan kapasitas masyarakat. Namun, keberhasilan ini belum merata di seluruh kabupaten/kota. Beberapa daerah seperti Melawi, dengan tingkat kemiskinan sebesar 11,12%, dan Landak, sebesar 9,97% pada 2023, masih menunjukkan angka yang cukup tinggi dibandingkan rata-rata provinsi. Tingginya angka kemiskinan di daerah-daerah ini menunjukkan tantangan besar dalam menyediakan akses pendidikan yang memadai dan berkualitas bagi masyarakat setempat.

Tingginya tingkat kemiskinan di wilayah-wilayah tertentu berdampak langsung pada kemampuan keluarga untuk memberikan dukungan terhadap pendidikan anak-anak mereka. Keluarga miskin sering kali menghadapi dilema antara memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan dan tempat tinggal, atau menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk biaya pendidikan. Biaya pendidikan, meskipun sering kali terlihat sebagai "beban tambahan," mencakup lebih dari sekadar uang sekolah; biaya seragam, buku pelajaran, transportasi, dan kebutuhan tambahan lainnya sering menjadi penghalang bagi keluarga miskin untuk memastikan anak-anak mereka tetap berada di bangku sekolah. Hal ini tidak hanya berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi sekolah, tetapi juga meningkatkan risiko anak-anak putus sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah.

Teori lingkaran setan kemiskinan yang diungkapkan oleh Nurkse (1944) dapat menjelaskan bagaimana kemiskinan berdampak pada pendidikan di Kalimantan Barat. Dalam teori tersebut, kemiskinan menjadi hambatan struktural yang sulit diputuskan tanpa intervensi signifikan. Keluarga miskin sering kali tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk berinvestasi dalam pendidikan, yang pada akhirnya membatasi peluang anak-anak mereka untuk meningkatkan kualitas hidup mereka di masa depan. Anak-anak yang tumbuh dalam kondisi miskin cenderung memiliki akses terbatas terhadap pendidikan yang layak, sehingga memengaruhi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Siklus ini berlanjut dari generasi ke generasi, menciptakan pola kemiskinan yang berulang dan sulit dihentikan tanpa kebijakan yang dirancang dengan baik.

Faktor kemiskinan juga berdampak pada infrastruktur dan fasilitas pendidikan di daerah-daerah dengan angka kemiskinan yang tinggi. Daerah-daerah seperti Melawi dan Landak, yang memiliki tingkat kemiskinan di atas rata-rata, sering kali kekurangan infrastruktur pendidikan yang memadai. Sekolah-sekolah di daerah ini mungkin tidak memiliki fasilitas yang layak, tenaga pendidik yang cukup, atau sumber daya pembelajaran yang memadai untuk mendukung pendidikan berkualitas. Anak-anak di daerah ini mungkin harus menempuh jarak yang jauh untuk mencapai sekolah terdekat, menghadapi jalan yang sulit diakses, atau bahkan kekurangan transportasi yang memadai. Kondisi ini semakin memperburuk kesenjangan pendidikan antara wilayah-wilayah ini dan daerah lain dengan kondisi ekonomi yang lebih baik.

Penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan pendapatan per kapita, dan kenaikan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan di Kalimantan Barat seharusnya menjadi pondasi untuk memperbaiki RLS. Namun, tantangan pemerataan akses dan kualitas pendidikan masih membutuhkan perhatian serius, terutama untuk kabupaten-kabupaten yang tertinggal. Pendekatan strategis yang mencakup pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah terpencil, peningkatan kualitas tenaga pengajar, dan penyediaan beasiswa berbasis kebutuhan menjadi langkah yang penting untuk memutus lingkaran kemiskinan dan mendorong kemajuan pendidikan di seluruh wilayah Kalimantan Barat. Dengan kebijakan yang

terarah, dampak positif dari peningkatan pendapatan dan pengeluaran pendidikan dapat lebih dirasakan oleh masyarakat secara merata.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Pernyataan Masalah

Kesenjangan akses dan kualitas pendidikan di Kalimantan Barat masih menjadi tantangan meskipun RLS meningkat dari 6,83 tahun pada 2014 menjadi 7,71 tahun pada 2023. Beberapa kabupaten, seperti Kayong Utara, Sambas, dan Sekadau, mencatatkan RLS di bawah rata-rata provinsi. Hal ini diduga dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan yang belum merata, pendapatan per kapita yang rendah di beberapa daerah, serta tingkat kemiskinan yang masih tinggi di kabupaten tertentu seperti Melawi (11,12%) dan Landak (9,97%). Ketiga faktor tersebut yaitu pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pendapatan per kapita, dan kemiskinan berpotensi memengaruhi pencapaian RLS di Kalimantan Barat. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan ketiga faktor tersebut untuk mengatasi kesenjangan pendidikan di Kalimantan Barat.

1.2.2. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh terhadap Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kalimantan Barat?
2. Apakah pendapatan per kapita berpengaruh terhadap Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kalimantan Barat?
3. Apakah kemiskinan berpengaruh terhadap Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kalimantan Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pernyataan masalah dan pertanyaan penelitian diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kalimantan Barat.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan per kapita terhadap Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kalimantan Barat.
3. Menguji dan menganalisis kemiskinan terhadap Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kalimantan Barat.

1.4. Kontribusi Penelitian

1.4.1. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pendapatan per kapita, kemiskinan, dan terhadap RLS di Kalimantan Barat dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan pemerintah di Kalimantan Barat.